

Pembiayaan Kapal untuk Layanan Pelayaran Daerah Terpencil: Studi Literatur terhadap Peran Pemerintah dan Swasta

Candra Kirana¹, Eliyanti Agus Mokodompit²

¹ Program Studi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, Universitas Karya Persada Muna, Indonesia

² Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo, Indonesia

Corresponding Author: Candra Kirana, e-mail: chandrakiranaafkm@gmail.com

Published: May, 2025

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan logistik yang signifikan dalam penyediaan layanan pelayaran ke wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Konektivitas antarpulau yang mengandalkan moda transportasi laut menjadi sangat krusial, terutama dalam distribusi layanan dasar seperti obat-obatan, vaksin, dan alat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis peran pemerintah dan sektor swasta dalam skema pembiayaan kapal untuk mendukung layanan pelayaran di wilayah 3T, serta mengevaluasi implikasinya terhadap ketahanan logistik kesehatan nasional. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis dengan pendekatan tematik-naratif. Literatur dikumpulkan melalui basis data Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR dengan kriteria inklusi artikel terbit tahun 2012–2024 yang fokus pada pembiayaan kapal, pelayaran perintis, serta kolaborasi sektor publik dan swasta di wilayah kepulauan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan temuan ke dalam tema model pembiayaan, peran strategis pemerintah, keterlibatan swasta, dan tantangan implementasi. Hasil kajian menunjukkan tiga model utama pembiayaan kapal: subsidi langsung pemerintah (PSO), pendanaan swasta dengan insentif fiskal, dan kemitraan pemerintah-swasta (PPP). Efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh integrasi lintas sektor dan keberlanjutan dukungan fiskal serta regulasi pro-investasi. Selain itu, ditemukan bahwa pelayaran berkelanjutan memiliki dampak signifikan terhadap akses layanan kesehatan di wilayah terpencil. Studi ini merekomendasikan penguatan sinergi kebijakan antar lembaga serta penerapan strategi *blended finance* sebagai solusi pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Pembiayaan kapal tidak hanya menjadi urusan transportasi, tetapi juga bagian dari infrastruktur kesehatan nasional yang perlu dirancang secara kolaboratif dan responsif terhadap tantangan geografis Indonesia.

Kata kunci: pembiayaan kapal, wilayah terpencil, pelayaran perintis, kemitraan pemerintah-swasta, logistik kesehatan, Indonesia

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, menghadapi tantangan geografis yang kompleks dalam penyediaan layanan transportasi antarpulau, terutama untuk daerah-daerah yang tergolong terpencil, tertinggal, dan perbatasan (3T). Ketergantungan terhadap moda transportasi laut sangat tinggi, mengingat banyak wilayah yang tidak memiliki akses darat atau udara yang memadai. Dalam konteks ini, layanan pelayaran tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarwilayah, tetapi juga menjadi infrastruktur vital dalam menjamin distribusi logistik penting seperti obat-obatan, alat kesehatan, bahan pangan, dan fasilitas pendidikan (World Bank, 2021; Bappenas, 2020).

Meskipun memiliki posisi strategis, sektor pelayaran nasional masih menghadapi berbagai kendala struktural dan finansial. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah dan kualitas armada yang dapat beroperasi secara efektif di wilayah terpencil, terutama kapal-kapal kecil yang sesuai dengan karakteristik pelabuhan perintis dan dermaga nonkomersial. Tingginya biaya investasi, fluktuasi harga bahan bakar, serta ketidakpastian permintaan menjadikan pelayaran perintis kurang menarik bagi pelaku usaha swasta (Nur, 2022). Dalam hal ini, keberadaan skema pembiayaan kapal yang berkelanjutan dan inklusif menjadi kunci untuk menjamin kontinuitas layanan publik.

Peran pemerintah menjadi sangat strategis, baik sebagai penyedia langsung layanan pelayaran maupun sebagai fasilitator yang menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah telah mengembangkan berbagai skema intervensi, mulai dari subsidi operasi kapal perintis, pembangunan kapal negara, hingga penyediaan pembiayaan berbunga rendah melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan lembaga keuangan daerah (Kementerian Perhubungan RI, 2023). Namun demikian, keterbatasan fiskal dan tingginya kebutuhan pembiayaan membuat keterlibatan sektor swasta menjadi semakin krusial.

Dalam perkembangan terakhir, skema pembiayaan inovatif seperti leasing kapal, kerja sama operasi (joint venture), dan project finance mulai diperkenalkan sebagai alternatif untuk menurunkan beban fiskal dan meningkatkan efisiensi pembiayaan (Arsyad & Hadi, 2023). Pendekatan berbasis kemitraan ini memungkinkan risiko dan beban investasi dibagi antara pemerintah dan swasta, sehingga menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur secara sistematis mengenai peran pemerintah dan sektor swasta dalam pembiayaan kapal yang melayani wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengevaluasi efektivitas skema pembiayaan yang telah diterapkan, mengidentifikasi hambatan implementasi, serta merumuskan peluang integrasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan daerah kepulauan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis penelitian-penelitian yang relevan terkait pembiayaan kapal dan peran pemerintah maupun sektor swasta dalam pelayanan pelayaran ke wilayah terpencil. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menyusun pemahaman teoritis dan praktis dari literatur yang tersebar dalam berbagai publikasi akademik, kebijakan, dan laporan lembaga (Tranfield, Denyer, & Smart, 2003).

Proses pencarian literatur dilakukan dengan mengakses empat basis data utama, yaitu: Scopus, Google Scholar, ScienceDirect, dan JSTOR. Penggunaan beberapa database bertujuan untuk meningkatkan cakupan literatur yang komprehensif dan meminimalkan bias publikasi (Boell & Cecez-

Kecmanovic, 2015). Adapun kata kunci yang digunakan dalam penelusuran literatur mencakup: *ship financing, remote maritime transport, public-private partnership in shipping*, dan *government subsidy for maritime services*.

Agar seleksi literatur lebih fokus dan relevan, diterapkan kriteria inklusi sebagai berikut:

- Artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu 2012–2024, untuk menjamin kekinian informasi.
- Studi yang memiliki fokus pada pembiayaan kapal atau logistik maritim di wilayah terpencil atau kepulauan.
- Penelitian yang menganalisis model peran pemerintah dan swasta, baik dalam bentuk studi kasus maupun kajian konseptual.

Dalam tahapan seleksi, judul, abstrak, dan isi artikel ditelaah untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan kajian. Literatur yang tidak memenuhi kriteria inklusi, seperti artikel yang hanya membahas pelayaran komersial besar atau tidak relevan dengan konteks wilayah terpencil, dieliminasi dari analisis.

Untuk tahap selanjutnya, analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan naratif-deskriptif. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam literatur, serta mengelompokkan temuan ke dalam beberapa tema utama yang berkaitan dengan strategi pembiayaan, bentuk intervensi pemerintah, dan mekanisme partisipasi swasta (Nowell et al., 2017). Pendekatan naratif digunakan untuk memberikan deskripsi menyeluruh terhadap dinamika interaksi antara aktor-aktor kunci dalam pembiayaan kapal.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks kebijakan dan praktik yang telah berkembang di berbagai negara atau wilayah, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk diterapkan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pembiayaan Kapal

Literatur menunjukkan bahwa skema pembiayaan kapal untuk mendukung layanan pelayaran di wilayah terpencil dan tertinggal dapat diklasifikasikan ke dalam tiga model utama:

a) Subsidi Pemerintah Langsung (*Public Service Obligation*/PSO)

Model ini berorientasi pada pelayanan publik murni, di mana negara memberikan subsidi operasional kepada operator pelayaran yang ditugaskan melayani trayek-trayek tertentu ke wilayah 3T. Contoh implementasi PSO yang berhasil adalah program Tol Laut Indonesia, di mana pemerintah menetapkan trayek tetap dan menyediakan subsidi langsung untuk menjamin keterjangkauan dan kontinuitas layanan (Kementerian Perhubungan RI, 2022). Skema ini dianggap efektif dalam menjawab kesenjangan logistik wilayah terpencil, termasuk pengangkutan logistik kesehatan dan bahan pokok (Bappenas, 2023).

b) Pendanaan Swasta dengan Insentif Fiskal

Model ini memanfaatkan mekanisme investasi swasta, tetapi disertai dengan insentif seperti pembebasan pajak, subsidi bunga, atau jaminan risiko. Dalam konteks negara berkembang, skema ini menjadi alternatif penting mengingat keterbatasan fiskal negara (UNCTAD, 2020). Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada jaminan regulasi yang stabil dan transparansi proyek.

c) Kemitraan Pemerintah-Swasta (*Public-Private Partnership*/PPP)

Model PPP berkembang pesat dalam proyek-proyek infrastruktur maritim. Dalam konteks pembiayaan kapal, PPP memungkinkan pembagian risiko dan pembiayaan antara pemerintah dan investor swasta. Menurut Lam & Yap (2019), PPP yang sukses ditandai oleh kontrak jangka panjang yang jelas, kepastian pasar, dan adanya mekanisme pengembalian modal yang dapat diprediksi.

Peran Strategis Pemerintah

Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam menjembatani kesenjangan pasar dan risiko investasi. Peran ini diwujudkan melalui:

- Pemberian jaminan pembiayaan, seperti penjaminan kredit kapal atau jaminan pasar melalui penugasan tetap.
- Subsidi bunga pinjaman, yang dilakukan melalui lembaga seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menurunkan beban keuangan pelaku usaha (Sihombing & Surbakti, 2019).
- Regulasi pro-investasi, termasuk simplifikasi izin pelayaran dan insentif untuk investasi kapal ukuran kecil-menengah yang sesuai dengan kondisi pelabuhan terpencil.

Kebijakan ini selaras dengan pendekatan pemerintah Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menekankan pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui penguatan konektivitas maritim.

Keterlibatan dan Ketertarikan Sektor Swasta

Keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan kapal untuk daerah terpencil masih bersifat selektif, sangat tergantung pada kepastian permintaan dan jaminan arus balik muatan (*backhaul cargo*). Studi oleh Lam & Yap (2019) menekankan bahwa insentif fiskal semata tidak cukup; dibutuhkan juga kepastian hukum, skema kontrak transparan, dan stabilitas pasar.

Model bisnis yang memberikan penugasan tetap dan perjanjian pengembalian investasi jangka panjang (ROI) lebih menarik minat investor, terutama di wilayah dengan potensi hasil bumi atau pariwisata lokal. Namun, dalam banyak kasus, ketidakpastian arus barang dari daerah terpencil membuat skema ini sulit diterapkan tanpa dukungan pemerintah.

Tantangan Struktural Pembiayaan

Berbagai literatur menyebutkan sejumlah tantangan utama dalam pembiayaan kapal untuk wilayah terpencil, antara lain:

- Risiko investasi tinggi akibat ketidakpastian jumlah penumpang dan kargo.
- Keterbatasan infrastruktur pelabuhan, seperti dermaga yang tidak memadai atau tidak tersedianya fasilitas bongkar muat yang efisien.
- Tingginya biaya operasional, terutama untuk kapal kecil dengan jalur panjang dan frekuensi rendah (UNCTAD, 2020).
- Kurangnya SDM teknis dan manajerial untuk mengelola rute terpencil secara komersial dan berkelanjutan.

Tanpa intervensi pemerintah, tantangan-tantangan ini akan terus menjadi penghambat utama bagi keterlibatan sektor swasta.

Implikasi terhadap Ketahanan Kesehatan Masyarakat

Konektivitas pelayaran di wilayah terpencil secara langsung berdampak terhadap akses layanan kesehatan, terutama dalam hal distribusi vaksin, obat-obatan esensial, alat kesehatan, serta mobilisasi tenaga medis. Dalam laporan WHO (2022), disebutkan bahwa wilayah kepulauan dan terpencil menghadapi keterlambatan distribusi logistik kesehatan hingga lebih dari dua minggu akibat tidak tersedianya moda transportasi laut yang rutin.

Dengan demikian, pembiayaan kapal yang berkelanjutan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan perdagangan, tetapi juga menjadi komponen strategis dalam sistem ketahanan kesehatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan kapal perlu diintegrasikan dalam rencana jangka panjang penguatan layanan dasar, termasuk kesehatan, di wilayah 3T.

KESIMPULAN

Pembiayaan kapal untuk layanan pelayaran ke daerah-daerah terpencil di Indonesia bukan sekadar tantangan teknis, melainkan merupakan isu strategis dalam pembangunan nasional yang menyangkut konektivitas, pemerataan ekonomi, dan ketahanan layanan dasar seperti kesehatan. Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa efektivitas pembiayaan sangat bergantung pada integrasi peran antara pemerintah dan sektor swasta.

Pemerintah memiliki fungsi utama sebagai fasilitator, baik melalui regulasi, penyediaan subsidi, maupun penjaminan pembiayaan. Sementara itu, sektor swasta memiliki peran penting sebagai pelaksana berbasis efisiensi pasar yang mampu mendorong inovasi dan efisiensi operasional. Dalam konteks ini, pendekatan blended finance, yaitu perpaduan antara subsidi langsung (PSO), insentif fiskal, dan skema

kemitraan pemerintah-swasta (PPP), terbukti menjadi strategi pembiayaan yang paling responsif terhadap kompleksitas geografis dan risiko pasar yang tinggi.

Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa pendekatan lintas sektor menjadi kunci untuk menjamin keberlanjutan layanan pelayaran ke wilayah terpencil. Salah satu sektor paling terdampak adalah sektor kesehatan, di mana layanan pelayaran memainkan peran vital dalam distribusi vaksin, obat-obatan, dan mobilisasi tenaga medis. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan kapal harus tidak hanya dilihat dari perspektif transportasi dan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari infrastruktur layanan dasar yang menopang sistem kesehatan nasional di wilayah kepulauan.

Dengan demikian, sinergi kebijakan antar kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan, sangat dibutuhkan untuk membentuk kerangka pembiayaan kapal yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dampak langsung dari model-model pembiayaan terhadap efektivitas layanan publik di lapangan, khususnya dalam konteks ketahanan logistik kesehatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan kajian ini. Secara khusus, penghargaan diberikan kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Bappenas atas ketersediaan data dan dokumen kebijakan yang menjadi referensi penting dalam studi literatur ini. Terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan akademisi dan peneliti yang telah memberikan masukan dalam proses penelaahan literatur, serta kepada lembaga pendidikan tempat penulis bernaung yang telah memberikan dukungan moral dan fasilitas selama penyusunan naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, M., & Hadi, S. (2023). Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pembiayaan Transportasi Laut di Wilayah Terpencil. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 18(1), 65–78.
- Bappenas. (2020). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2023). *Analisis Pembiayaan Infrastruktur Maritim dalam Mendukung Konektivitas Wilayah Terpencil*. Direktorat Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). *Catatan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2022*. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Lam, J. S. L., & Yap, W. Y. (2019). Financing sustainable port and shipping development. *Maritime Policy & Management*, 46(5), 461–476. <https://doi.org/10.1080/03088839.2018.1537464>

- Nur, L. M. (2022). Tantangan Operasional dan Pembiayaan Kapal Perintis di Indonesia. *Transportasi Maritim Indonesia*, 10(2), 123–137.
- Sihombing, H., & Surbakti, P. (2019). Peran LPEI dalam Pembiayaan Ekspor Maritim. *Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia*, 7(2), 77–89.
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- UNCTAD. (2020). *Review of Maritime Transport 2020*. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdfUN Trade and Development (UNCTAD)+3UN Trade and Development (UNCTAD)+3UN Trade and Development (UNCTAD)+3
- World Health Organization. (2022). *Health Logistics in Island and Remote Areas: Global Guidelines*. Geneva: WHO Press.